

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	RDPU
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	6 (enam)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 31 Maret 2015
W a k t u	:	Pukul 19.50 s.d. 22.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD) didampingi : 1. Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PAN) 2. Dodi Reza Alex Nurdin, Lic.Econ, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) 3. Heri Gunawan, SE, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PGERINDRA) 4. DR. IR. HM. Farid Al-Fauzi, MMT (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PHANURA).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI).
A c a r a	:	Masukan terhadap Penyusunan Draft RUU tentang BUMN
Hadir	:	A. 41 dari 48 Anggota Komisi VI DPR-RI B. Ketua Umum KADIN beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. RDPU Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 19.50 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan telah dihadiri 41 Anggota Komisi VI DPR RI dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDPU hari ini, Selasa, 31 Maret 2015 untuk mendapatkan masukan dari KADIN dalam rangka penyusunan Draft RUU tentang BUMN.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Ketua Umum KADIN untuk memberikan paparannya.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas paparan Ketua Umum KADIN.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN :

MASUKAN KETUA UMUM KADIN

1. Selama ini interaksi antara Kadin dengan BUMN pada umumnya dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 1 tahun 1987 tentang Kadin Indonesia. Menurut UU tersebut dinyatakan bahwa Kadin merupakan wadah tunggal yang menaungi pengusaha swasta, BUMN dan koperasi. Menurut pendapat kami peran BUMN dalam struktur ekonomi harus sinergis
2. Dengan peran swasta dan koperasi, dalam kenyataannya sinerg tersebut belum tercipta. Di daerah, usaha swasta menengah harus bersaing dengan BUMN dalam melaksanakan tender proyek APBN maupun APBD.
3. Dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa butir pendapat dan masukan terkait upaya untuk meningkatkan peran BUMN apabila dilihat dari perspektif dunia usaha, sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi yang maksimal dari BUMN untuk pendapatan Negara, maka BUMN harus dapat dikelola secara profesional, efisien dan produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka manajemen BUMN harus terdiri dari para profesional yang terbaik dan teruji dalam bidang masing-masing. Hal ini berarti kita harus mampu merubah pola pikir kita dari kebiasaan menunjuk manajemen BUMN atas dasar kepentingan sempit dan subjektif. Dengan kata lain seandainya untuk jabatan pimpinan BUMN kebetulan yang terbaik adalah orang asing, maka pemanfaatan mereka dalam pengelolaan BUMN harus dimungkinkan. Mengapa? Karena dari keuntungan dan deviden maksimal yang diperoleh perusahaan BUMN tersebut akan dapat menjadi kontribusi yang sangat berarti bagi pendapatan negara. Praktek-praktek seperti ini telah dilakukan oleh Singapura dan Malaysia, sehingga BUMN mereka bisa menjadi perusahaan kelas dunia (Singapore Airline dan Petronas).
 - b. Dalam rangka menuju BUMN yang profesional dan efisien serta memiliki daya saing yang tinggi, maka tujuan akhir dari status BUMN adalah menjadi perusahaan publik (privatisasi). Namun kami dari Kadin berpendapat bahwa langkah menuju perusahaan publik BUMN perlu dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah privatisasi BUMN dalam pengelolaannya. Yang dimaksud adalah melalui langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagaimana dalam butir 1 di atas. Artinya perusahaan BUMN harus dibuat menjadi perusahaan yang efisien dan menguntungkan sebelum langkah berikutnya dilakukan pada tahap kedua. Tahap kedua adalah privatisasi dalam kepemilikan atau dengan kata lain perusahaan BUMN nya di-go public-kan, dijual sebagian saham kepada publik. Proses tahap pertama perlu dilakukan, karena dengan demikian nilai yang didapatkan negara dari penjualan saham ke publik menjadi optimal.
 - c. Menyangkut peran BUMN sebagai “agent of development”, kegiatan tersebut adalah hal yang perlu dibedakan dari tujuan utama pengelolaan BUMN menuju BUMN yang seefisien dan se-provitabel mungkin. Tugas dan misi sebagai agent of development itu baru dapat direalisasikan dengan mengambil prosentase tertentu dari keuntungan maksimal yang diraih BUMN tersebut.

- d. Dalam rangka upaya untuk menciptakan BUMN yang sangat efisien dan profesional sebagaimana diuraikan dalam butir dimuka, maka perlu pula dikaji kemungkinan melakukan penggabungan (merger) antara beberapa BUMN agar menjadi BUMN yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Misalnya penggabungan diantara BUMN-BUMN dibidang pertanian, konstruksi, infrastruktur, pertambangan, dllnya.
- e. Dalam konteks menghadapi MEA 2015 dan perjanjian-perjanjian pasar bebas dengan negara-negara lain, maka posisi dan peran strategis BUMN dalam sektor-sektor tertentu sangat krusial bagi kepentingan nasional dan bangsa kita, khususnya dalam rangka penguasaan pasar dan sumber daya alam kita. Oleh karena itu BUMN menjadi benteng terakhir yang harus diperkokoh agar kepentingan nasional kita tetap terjamin. Dominasi BUMN kita dalam sektor tertentu tidak perlu dipermasalahkan sebagai kegiatan yang monopolistis, bahkan perlu tetap diperkuat, sehingga jangan sampai kekuatan asing bisa menguasai bidang-bidang yang strategis bagi kepentingan negara. Misalnya bidang-bidang hulu-hilir perminyakan dan gas, perbankan, industri baja, pertambangan, perkebunan, pertanian dan lain-lain. Penguasaan pasar dan dominasi kita dalam sektor-sektor tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan.
- f. Dalam rangka memperkuat struktur perekonomian kita dengan merealisasikan program-program strategis yang juga telah direncanakan oleh Pemerintah seperti: percepatan pembangunan infrastruktur, industrialisasi, hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan termasuk pertambangan dan perkebunan, perikanan, pariwisata, substitusi impor, peran BUMN sangat vital sebagai katalisator yang dapat menjadi lokomotif bagi dunia usaha lainnya.
- g. Salah satu pilar perekonomian kita yang belum diberdayakan secara optimal adalah UMKM yang jumlahnya puluhan juta. Dalam kaitan ini BUMN dapat banyak berperan untuk mendukung UMKM dengan memberikan peluang akses pasar, akses pendanaan, akses pelatihan/pendidikan dan akses teknologi bagi para pengusaha-pengusaha menengah kecil.
- h. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, BUMN bersama dengan dunia usaha swasta dan koperasi harus dapat bersinergi lebih baik, saling mendukung dan memberdayakan sehingga potensi kekuatan perekonomian bangsa bisa dicapai secara maksimal.
- i. Tambahan penjelasan :
 - Untuk mendapatkan keuntungan setelah itu baru disisihkan untuk memberikan bantuan lingkungan.
 - Perlu dilakukan merger diantara BUMN di Bidang Pertanian dan Konstruksi
 - Persaingan antar bangsa meliputi sumber dana, ekspor, SDM, dan teknologi.
 - Jangan sampai kepentingan asing menguasai kepentingan strategis bagi bangsa Indonesia seperti dibidang perkebunan, pertambangan, energy, dan lain-lain.
 - Percepatan pembangunan infrastruktur, industry berbasis komoditas unggulan, dan industry.
 - Peran BUMN untuk memberdayakan UMKM belum maksimal sehingga akses, pasar, pendanaan, pelatihan dan tekonologi belum optimal.
 - BUMN Koperasi dan Swasta harus saling mendukung dan saling memberdayakan untuk menghadapi persaingan bebas.
 - Bahan baku industry untuk UKM dihulu sudah dikuasai asing sehingga bahan baku harus impor.

- Untuk industry berbasis SDA Peran pemerintah harus ditingkatkan agar tidak dikuasai asing, sekarang ini industry UKM dikuasai asing.
- Sistem Rekrutment di BUMN tidak terbuka, untuk diadopsi oleh keseluruhan BUMN.
- Perusahaan BUMN tidak perlu ikut antri untuk bersaing dengan proyek-proyek kecil yang bisa ditangani oleh para pelaku UKM UKM.
- Banyak BUMN yang melakukan diversifikasi usaha sehingga makin tidak fokus dan sering terjadi persaingan antara swasta dan BUMN. seperti contoh Pertamina yang mempunyai anak perusahaan yang bergerak di pelayaran, seharusnya Pertamina tidak perlu mengikuti tender di usaha-usaha lain. Contoh lain PLN mempunyai diversifikasi di bidang pelayaran sehingga bersaing dengan swasta.
- PT. Pelni pada awalnya bertugas sebagai BUMN PSO tetapi sekarang sudah beralih ke Angkutan batubara untuk tujuan provit, maka BUMN harus fokus pada satu sector bisnis sesuai dengan core bisnisnya.
- Tidak perlu ada keterlibatan Konsultan Asing di dalam Proyek-proyek BUMN di Indonesia.
- Meminta DPR mereview apa tafsir dari Pasal 33 ayat 1,2, dan, 3 UUD 1945, karena kita sudah menyepakati pasar bebas tetapi masih melanggar konstitusi Negara kita.
- Fakta banyak BUMN yang tidak perform karena lemahnya manajemen Direksi BUMN, sampai ada BUMN yang mempunyai usaha jasa catering.
- Informatic economy akan merubah cara pandang terhadap ekonomi.
- Potensi sumber daya negara kita yang sangat melimpah tetapi cara pengelolannya tidak professional.
- Mencontoh Temasek di Singapur memiliki Lembaga *Sovereign Wealth Fund* (SWF) sebagai Alternatif Pembiayaan.

III. KESIMPULAN

Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua Umum KADIN beserta jajaran dan menerima semua masukannya untuk selanjutnya akan dijadikan acuan oleh masing-masing fraksi dalam penyusunan Draft RUU tentang BUMN.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 22.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

IR, H. AZAM AZMAN NATAWIJANA

A-530